

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
 Nama OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : 2025-2029
 Urusan Pemerintahan :

NO		INDIKATOR	PERNYATAAN RISIKO	KODE RISIKO	PEMILIK RISIKO	SEBAB	SUMBER	U/ C	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Manipulasi hasil analisis untuk kepentingan tertentu	RFO.26373501	KEPALA-BADAN	Konflik kepentingan, tekanan pihak eksternal dan lemahnya independensi analis	I	C	Kebijakan pajak tidak optimal dan potensi kebocoran PAD	Bapenda
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Manipulasi temuan pengawasan	RFO.26373502	KEPALA-BADAN	Kolusi antara pengawas dan pihak diawasi	I	C	Pelanggaran berulang dan potensi kerugian daerah	Bapenda
3	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeriksaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Perubahan Data Pajak Tanpa Otorisasi	RFO.26373503	KEPALA-BADAN	Akses Sistem Tidak Terkendali	I	C	Penurunan Penerimaan Pajak	Bapenda
4	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai menjadi Non Tunai	Pemotongan atau penahanan dana sebelum disetor	RFO.26373504	KEPALA-BADAN	Selah SOP transisi sistem	I	C	Kerugian keuangan daerah	Bapenda
5	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Penagihan fiktif atau tidak disetorkan	RFO.26373505	KEPALA-BADAN	Pengawasan lapangan lemah	I	C	Kebocoran PAD	Provinsi Kalimantan Utara
6	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Perubahan klasifikasi objek pajak	RFO.26373506	KEPALA-BADAN	Penyalahgunaan kewenangan	I	C	Penurunan nilai pajak	Bapenda
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh	RFO.26373507	KEPALA-BADAN	Konflik kepentingan dan/atau suap	I	C	Pelanggaran tidak terdeteksi	Bapenda
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan tidak sesuai kebutuhan	RFO.26373508	KEPALA-BADAN	Perencanaan tidak berbasis kompetensi	I	C	Kompetensi pegawai tidak meningkat	Bapenda
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
9	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pembayaran pemeliharaan sistem yang tidak dilakukan	RFO.26373509	KEPALA-BADAN	Pengawasan kontrak lemah	I	C	Sistem tidak optimal	Masyarakat Kalimantan Utara
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar regualsi	Terjadinya titipan anggaran pada penyusunan Renja dan RKA	RFO.26373510	KEPALA-BADAN	Lemahnya proses reviu dan tekanan eksternal	E	C	Program tidak sesuai prioritas daerah serta menurunkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Bapenda